



KPU Dituding Giring Opini Publik

YOGYAKARTA – Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melakukan *real count* dan dibuka untuk publik dipersoalkan tim pemenangan paslon nomor urut 1, Imam Priyono-Achmad Fadli. KPU dinilai menggiring opini publik seolah menegaskan kemenangan pasangan nomor urut 2.

"Kami mempertanyakan dasarnya apa? Sampai kemarin KPU melakukan *real count*, bahkan mendahului proses perhitungan secara manual. KPU tidak boleh melakukan *real count* apalagi dipublikasi," ujar Ketua Tim Pemenangan IP-Fadli, Danang Rudyatmoko di Kantor DPC PDIP Kota Yogyakarta, kemarin siang.

Danang mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih meyakini keunggulan paslon no-

mor urut 1. Namun, pihaknya juga mempertanyakan proses perhitungan surat suara di 10 kecamatan yang dilakukan hanya berselisih jam. Apalagi, undangan untuk tim saksi dari paslon 1 diserahkan saat datang ke kecamatan.

Kejanggalan juga ditemukan dalam merespons permohonan saksi paslon 1 yang meminta agar surat suara tidak sah kembali dibuka.

Keinginan ini didasarkan



Tim pemenangan paslon 1 menunjukkan bukti-bukti kecurangan di Kantor DPC PDIP Kota Yogyakarta, kemarin.

karena selisih suara yang tidak banyak. Karena itu, pihaknya ingin memastikan di mana tidak sahnya.

"Suara tidak sah yang mencapai 14.000 lebih dengan *suara real count* KPU itu besar beda-

nya. Selisih yang kecil itu perlu keterbukaan. Kami akan terus mendorong di belakang pemilik 14.000 suara yang dianggap tidak sah itu agar terlindungi hak konstitusinya," paparnya.

Ketua Bappilu PDIP Kota

Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan, ada indikasi KPU tidak netral di Kecamatan Kotagede dan Danurejan. Indikasinya saat saksi paslon nomor urut 1 meminta agar surat suara rusak dibuka. Saat itu, saksi nomor 2 setuju, demikian pula dengan panwascam.

Setelah surat suara tidak sah di TPS01-18 dibuka ditemukan dugaan bahwa 80% surat suara yang dianggap tidak sah diserahkan kepada pemilih tidak sesuai prosedur. Yang mana, seharusnya surat suara diberikan terbuka, tapi diberikan tertutup. Ini dibuktikan dengan hasil coblosan secara simetris.

"Masuk kotak suara ke-18, break salat asar. Kemudian datang KPU. Setelah itu tiba-tiba saksi paslon 2 komplain, padahal awalnya sudah sepakat.

Hal 11

(dari Hal 1

Kemudian PPK menyerahkan kepada panwas, ternyata panwasnya ganti orang. Di Danurejan juga sama," ucapnya.

Aries Surya dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDIP mengatakan, pihaknya akan melakukan prosedur hukum terhadap dugaan kecurangan pada Pilwali 15 Februari lalu. Dari 14 kecamatan di Kota Yogyakarta dan hasil perhitungan *real count* KPU ditemukan sedikitnya 1.000 surat suara tidak sah per kecamatan.

"Kalau tidak curang, yakin paslon 1 menang? Kita segera lapor ke panwas, kalau dari telah panwas ada indikasi pidana, maka akan diteruskan ke Gakumdu. Kami akan laporkan sesuai bukti yang kami miliki," katanya.

Sementara itu, kubu pasangan calon Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi menayangkan proses rekapitulasi suara Pilwali Kota Yogyakarta 2017 di tingkat panitia pemilih kecamatan (PPK) pada Kamis (16/2) diwarnai pembukaan surat suara.

"Ada upaya untuk memaksakan kehendak membuka surat suara tidak sah di tiga PPK, yaitu Umbulharjo, Kotagede, dan Ngampilan," ujar Ketua Steering

Committee Tim Pemenangan Haryadi-Heroe, Muhammad Sofyan, di Sekretariat SC Haryadi-Heroe di Omah Putih Jalan Brigjen Katamsa, kemarin.

Menurutnya, untuk membuka surat suara harus ada alasan kuat, yaitu terjadi perbedaan data C1 yang dipegang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan C1 yang dipegang saksi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam). Di tiga PPK tersebut, tak ada satu pun perbedaan data C1 dan tak ada keberatan dari saksi kedua paslon.

"Jika ada pihak yang keberatan, seharusnya sudah disampaikan saat proses rekapitulasi di tempat pemungutan suara (TPS). Jadi, pembukaan surat suara di PPK kemarin sebetulnya tak perlu karena tidak ada dasar kuat," tandasnya.

Pihaknya pun telah mengajukan keberatan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. Meskipun di sisi lain, pembukaan surat suara di PPK hari pertama Kamis kemarin tak merugikan kubu Haryadi-Heroe. "Justru suara kami bertambah satu suara, dari surat suara tidak sah yang dibuka di PPK Kotagede. Sedangkan di Ngampilan dan Umbulharjo,

tidak ada perubahan dan artinya memang tak ditemukan kecurangan," paparnya.

Sementara itu, berdasar hasil perhitungan *real count* C1 saksi yang ditugaskan di 794 TPS, hasil *scoring* KPU yang diunggah ke situs KPURI, dan dari pemantauan rekapitulasi suara di 10 PPK, Sofyan menegaskan perolehan suara Haryadi-Heroe masih unggul dibandingkan rivalnya, Imam Priyono-Achmad Fadli.

"Paslon satu (Imam-Fadli) meraih 99.122 suara atau 49,69%, dan paslon dua (Haryadi-Heroe) sebanyak 100.371 suara atau 50,31%. Hari ini (Jumat 17/2) ada empat PPK yang melakukan proses rekap, tapi kami yakin tak ada perubahan. Sehingga kami tegaskan sekali lagi, kami umumkan dan kami yakin Pak Haryadi dan Pak Heroe jadi pemenang Pilwali 2017," kata Sofyan.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kota Yogyakarta Agus Muhammad Yasin mengakui proses rekapitulasi suara di sepuluh PPK Kamis lalu diwarnai pembukaan surat suara tidak sah atau rusak, yaitu di Kecamatan Umbulharjo dan Kotagede. Sementara hari kedua, Jumat kemarin, tak ada

pembukaan surat suara rusak.

"Hingga sore ini (kemarin) belum ada laporan dari panwascam. Di Mergansan saksi salah satu paslon sempat minta dibuka, tapi tak ada kesepakatan dengan saksi paslon lainnya sehingga tidak dibuka," ucapnya.

Sesuai regulasi, membuka ulang surat suara di tingkat PPK bisa dilakukan jika ada perbedaan data C1 antara KPPS dan saksi kedua paslon maupun ada catatan dalam berita acara di TPS. Jika tidak maka proses di PPK hanya tinggal merekap saja karena proses perhitungan surat suara sudah selesai di TPS.

"Di Kotagede memang petugas TPS keliru menulis data, jadi ada kesepakatan membuka ulang surat suara. Posisi panwascam hanya mengawasi dan menengahi agar proses berjalan sesuai aturan," ujarnya.

Usai pemungutan suara, Rabu (15/2), tahapan Pilwali Yogyakarta 2017 dilanjutkan tahap rekapitulasi di PPK. Kamis (16/2), sepuluh PPK melaksanakan rekapitulasi, yaitu di Kecamatan Gondomanan, Keraton, Jetis, Gedongtengen, Pakualaman, Umbulharjo, Gondokusuman, Tegalrejo, Ngampilan, dan Kotagede. Adapun Jumat (17/2) kemarin, PPK me-

kerja sama di antara, yaitu Wirobrajan, Mergangsan, Mantiye-ron, dan Danurejan. Hasil rekapitulasi PPK selanjutnya dikirim ke KPU untuk dihitung mulai pada 23-24 Februari mendatang.

njabat Wali Kota gatkan Deklarasi Damai

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo angkat bicara untuk meredakan suhu politik yang semakin memanas pascapemungutan suara Pilwali Yogyakarta 2017. Sulistiyo berharap kedua paslon dan seluruh unsur tim sukses dan pendukungnya agar menahan diri hingga usai proses rekapitulasi oleh KPU.

"Kedua paslon di awal kampanye sudah deklarasi damai, saat hari terakhir masa kampanye juga kembali deklarasi damai. Jadi tolong mari kita bersama-sama menjaga iklim sejuk di Kota Yogyakarta," kata Sulistiyo di Kompleks Balai Kota Yogyakarta kemarin.

Menurut Sulistiyo, masing-masing kubu paslon memang berhak menghitung sendiri hasil perolehan suara sebagai data pembandingan maupun bentuk partisipasi untuk mengawal

Pilwali 2017. Namun, jangan sampai menggoat kegaduhan yang berujung ketidaknyamanan di lapisan masyarakat.

"Tujuan pilkada itu ingin mencari pemimpin terbaik, kalau seperti ini (kegaduhan) ini bukan tujuan kita. Mari kita ciptakan suasana aman dan damai, karena aman dan damai kita sendiri yang menciptakan," katanya.

Sulistiyo juga meminta kedua paslon dan pendukung agar mempercayakan sepenuhnya proses rekapitulasi suara kepada KPU. Dia yakin KPU bekerja secara profesional dan transparan. Ikuti mekanisme sesuai aturan, masyarakat saya imbau jangan mudah terprovokasi. Kita semua berkewajiban menjaga ketenteraman Kota Yogyakarta," ucapnya.

Sementara itu, KPU Kota Yogyakarta menegaskan profesionalismenya dalam menyelenggarakan tahapan Pilwali Kota Yogyakarta 2017. Segala polemik yang membumbui proses rekapitulasi suara diharapkan segera mereda.

"Kami sudah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur. Kami jaga netralitas dan transparansi," kata Ketua KPU Yog-

yakarta Wawan Budiyanto kemarin.

Adanya pihak yang mendesak dibukanya suatu suara tidak sah atau rusak dalam proses rekapitulasi di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK), diakuinya bisa menyetujui asal-kantak ada regulasi yang dilanggar. Yaitu harus ada alasan dan bukti terkait dengan selisih data saksi paslon dengan data yang tertera dalam piano C1.

"Surat suara itu boleh dibuka sepanjang ada perbedaan data dan harus ada rekomendasi panwascam. Karena surat suara tidak sah sudah diproses di tingkat TPS," ucapnya.

Terkait unggahan C1 di website KPU RI, Wawan menilai sebagai ruang untuk memenuhi hak publik dalam mengontrol perolehan suara. Apalagi mekanisme tersebut dilakukan secara nasional dan sudah bergulir sejak pemilu sebelumnya.

"Tapi yang digunakan tetap rekapitulasi berjenjang yang sekarang masih di tingkat kecamatan," kata Wawan. Dia juga berharap semua pihak mendukung proses rekapitulasi suara yang tengah dilakukan jajaran KPU.

● sodik/
ristuhanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005